WOMEN WOMEN WOMEN WOMEN

07

EMANG BENER PEREMPUAN GAK PENTING?

Wah debat capres pertama udah berlangsung nih guys. Gimana kemarin debatnya, seru gak?

Tapi kayanya ada yang kurang yah, karena berdasarkan rilis yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum (KPU), sepertinya belum ada nih tema debat yang mengusung isu perempuan secara spesifik.

Padahal, kalau kita mau membicarakan isu perempuan memang harus spesifik karena **isu-isunya sangat serius**. Misal kasus-kasus kekerasan kepada perempuan sampai sekarang belum juga membaik keadaannya. Per-Mei 2023 aja, ketika memperingati 1 tahun UU TPKS, **laporan tindak kekerasan kepada perempuan di Komnas Perempuan persentasenya masih 65% alias mendominasi.**





Berdasarkan data yang dihimpun oleh Simfoni PPA selama periode Januari-Juni 2023, tercatat bahwa kasus yang paling banyak terjadi adalah KDRT, mencapai 48,04 persen atau sebanyak 7.649 kasus. Hal ini menunjukkan bahwa dan penanganan kasus kekerasan masih merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diperhatikan. kasus kekerasan masih merupakan tanggung jawab bersama yang perlu diperhatikan.

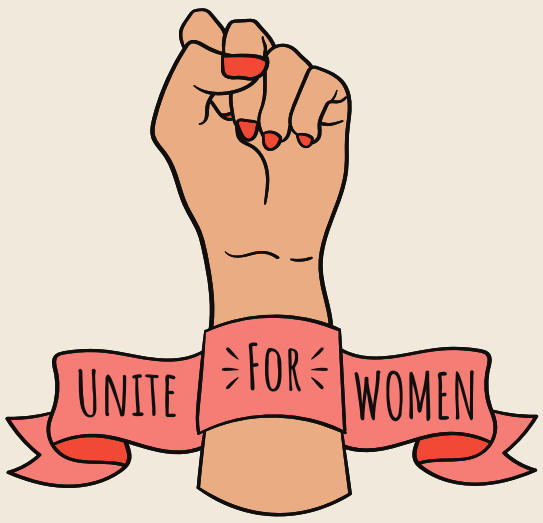


Kenapa Masih Banyak Kasus Kekerasan Perempuan?

01 Banyaknya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi saat ini disebabkan oleh masih kuatnya nilai-nilai patriarki dalam masyarakat. Nilai-nilai patriarki ini tercermin dalam perilaku dominasi individu di setiap aspek kehidupan kita. Kekerasan berbasis gender melibatkan pandangan bahwa perempuan dan anak dianggap sebagai makhluk yang dilemahkan, baik secara fisik, posisi dalam masyarakat, maupun peran sosial.

02 Beberapa orang mungkin tidak sepenuhnya menyadari dampak negatif dari tindakan kekerasan terhadap perempuan atau mungkin menganggapnya sebagai norma yang dapat diterima.

03 Sistem hukum yang lemah atau tidak konsisten dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dapat memungkinkan pelaku kekerasan untuk menghindari pertanggungjawaban.





MAU TAU SELENGKAPNYA?
JANGAN LUPA DENGERIN

Ngobi

Ngobrol Kebijakan

DI SPOTIFY

Powered by

THE INDONESIAN INSTITUTE
CENTER FOR PUBLIC POLICY RESEARCH